

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- F. Sugeng Istanto, 2007, *Penelitian Hukum*, CV Ganda, Yogyakarta.
- Hamdan Zoelva, 2011, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Johani Ibrahim, 2007 *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- , 2011, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2012, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2014, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Miriam Budiardjo, 2013, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Ni'matul Huda, 2008, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, *Naskah Konprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 (Edisi Revisi)*, Buku III Jilid 1, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2008, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.

Sri Soemantri, 1993, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sebelum Perubahan).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Setelah Perubahan).

Konstitusi Republik Indonesia Serikat.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1973 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1978 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Serikat Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2915).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3811).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4310).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1946 tentang Susunan dan Pemilihan Anggota Komite Nasional Pusat.

C. Jurnal, Makalah, Internet, dan Kamus

Ah Mujib Rohmat, *Kedudukan dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Era Reformasi*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume III, Nomor 2, Mei-Agustus 2016.

AM Fatwa, *Tugas dan Fungsi MPR serta Hubungan Antar Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan*, Jurnal Majelis Volume 1, Nomor 1, Agustus 2009.

Bahrul Ilmi Yakup, *Kinerja MPR*, <http://kompas.com/>, diakses pada 8 Januari 2018, pukul 13:18 WIB.

Dwi Indri Astuti, Iskandar Syah, dan Syaiful M, *Hubungan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dengan Lembaga Kepresidenan Pada Tahun 1945-1949*, Jurnal Pesagi Volume 2, Nomor 4, tahun 2014.

Efriza, *Problematika dan Prospek MPR: Dulu, Kini, dan Nanti*, Jurnal Populis Volume 2, Nomor 4, Desember 2017.

Ella Syafputri, *Pimpinan MPR di era Reformasi*, <http://antaranews.com>, diakses pada 22 Mei 2018, pukul 16:36 WIB.

Jamaludin Ghafur, *Penguatan Lembaga DPD melalui Amandemen Ulang Lembaga MPR*, Jurnal Hukum, Volume 14, Nomor 3, Juli 2007.

Jimly Asshidiqie, *Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan Tingkat Pusat*, Makalah disampaikan dalam Ceramah Umum untuk DPD.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016.

Muh. Risnain dan Sri Karyati, *Menimbang Gagasan Perubahan Konstitusi dan Tata Cara Perubahan Konstitusi Republik Indonesia*, Jurnal Ius Volume V, Nomor 1, April 2017.

Nike K. Rumokoy, *Kedaulatan dan Kekuasaan dalam UUD 1945 dalam Pembentukan Hukum di Indonesia*, Jurnal Universitas Sam Ratulangi Volume XVII, Nomor 1, April – Juni 2009.

R. Nazriyah, *Penguatan Peran Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum & Pembangunan Volume 47, Nomor 1, tahun 2017.

Redaksi, Daftar Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, <http://id.wikipedia.org>, diakses pada 22 Mei 2018, pukul 16:36 WIB.

Redaksi, *LIPI Tolak Penguatan Kembali MPR*, <http://lipi.go.id/>, diakses pada 30 Mei 2018, pukul 12:41 WIB.

Rusla, *Taufiq Kiemas Ketua MPR 2009-2014*, <http://antaranews.com>, diakses pada 22 Mei 2018, pukul 16:36 WIB.

Unggul Sugiharto, *Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) Sebuah Anomali Suprastruktur Negara Pada Tahun 1945*, Jurnal Politika Volume 1, Nomor 2, tahun 2010.

Widayati, Absori, dan Aidul Fitrijadi Azhari, *Rekonstruksi Kedudukan Ketetapan MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Media Hukum Volume 21, Nomor 2, Desember 2014.

Widyawati, *Perbandingan Materi Muatan Ketetapan MPR Pada Masa Pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume III, Nomor 1, Januari – April 2016.

